

**REFORMASI BIROKRASI DALAM UPAYA PELAKSANAAN
PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI UNTUK MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCE**
(Studi Pada UPTD Kesehatan)

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui reformasi birokrasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya pelaksanaan pelayanan publik untuk mewujudkan Good Governance, serta untuk mengetahui faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang berlangsung di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau, studi pada UPT Dinas Kesehatan tersebut. Sebagai informan atau responden penelitian meliputi Kepala Dinas Kesehatan, Kepala UPTD Kesehatan, serta masyarakat pengguna layanan kesehatan di UPTD Kesehatan tersebut. Jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder; dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi birokrasi dalam upaya pelaksanaan pelayanan publik di dinas kesehatan kabupaten kuantan singgingi untuk mewujudkan good governance sudah cukup terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terimplementasinya penggunaan standar pelayanan dalam pelayanan publik pada UPTD Kesehatan, dan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik UPTD Kesehatan tersebut, serta tercipta pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih baik dan lebih terjangkau di bidang kesehatan. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi dalam Upaya Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi pada UPTD Kesehatan) pada umumnya yaitu terkait dengan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan yang tersedia pada UPTD Kesehatan, seperti masih kurang memadainya tenaga medis yang bertugas, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, serta kemampuan manajemen pelayanan.

Kata Kunci : reformasi birokrasi, standar pelayanan, partisipasi masyarakat, UPTD Kesehatan.

**BUREAUCRACY REFORM EFFORTS IN THE IMPLEMENTATION OF
PUBLIC SERVICES IN KUANTAN SINGINGI DISTRICT HEALTH
OFFICE TO REALIZE GOOD GOVERNANCE**
(Studies in Health Unit Technical Implementing Agency)

ABSTRACT

The study aims to analyze and find out the bureaucratic reform in Kuantan Singingi District Health Office in an effort to realize the implementation of public services for good governance, and to investigate the inhibiting factor. The research uses descriptive method with qualitative approach, which took place in Kuantan District Health Office Singingi Riau Province study on the Health Service Unit. As informants or survey respondents include the Chief Medical Officer, Head of Health Unit Technical Implementing Agency, and society use the health services in the Health Unit Technical Implementing Agency. Types and sources of data are primary data and secondary data; and data collection using the techniques of interview, observation and documentation. The data analysis technique used is the analysis of qualitative data. The results of this study concluded that bureaucratic reforms in public service delivery efforts in the health department Kuantan Singingi to realize good governance has been performing well enough. It can be seen from terimplementasinya use service standards in the public service on Health Unit Technical Implementing Agency, and an increase in community participation in administering public services Health Unit Technical Implementing Agency, as well as create a public service that is faster, safer, better and more affordable healthcare. The limiting factor in the implementation of the Reforms at the District Health Office Kuantan Singingi in Efforts Implementation of Public Services (Studies in Health Unit Technical Implementing Agency) generally are associated with infrastructure and service facilities available at Health Unit Technical Implementing Agency, as still inadequate medical personnel on duty, procurement of medicines and medical supplies, as well as service management capabilities.

Keywords: bureaucratic reform, service standards, community participation, Health Unit Technical Implementing Agency.